

## **KOORDINASI DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KELURAHAN SUNGAI BELIUNG KECAMATAN PONTIANAK BARAT**

Oleh:

**ELAS DIAN  
NIM E01110097**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. 2014.**

**Email : [elasdian@yahoo.co.id](mailto:elasdian@yahoo.co.id)**

### **ABSTRAK**

Permasalahan mengenai koordinasi dalam program pemberdayaan perempuan di Kelurahan Sungai Beliung adalah tidak terlaksananya kegiatan pelatihan keterampilan dalam program pemberdayaan perempuan, dikarenakan kurang terkoordinasinya program pemberdayaan perempuan antara Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pontianak sebagai pihak yang mengkoordinir, dengan Kelurahan Sungai Beliung yang sebagai pihak yang terkoordinir untuk melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan dalam program pemberdayaan perempuan. Penulisan artikel ini menggunakan teori koordinasi horizontal antar instansi (Hasibuan, 2006) untuk mengetahui koordinasi melalui kewenangan, koordinasi melalui konsensus, koordinasi melalui pedoman kerja, koordinasi melalui forum, koordinasi melalui konferensi dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan di Kelurahan Sungai Beliung. Pendekatan yang digunakan merupakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan pelatihan keterampilan karena koordinasi horizontal antar badan (instansi) baik koordinasi melalui kewenangan, koordinasi melalui konsensus, koordinasi melalui pedoman kerja, koordinasi melalui forum, koordinasi melalui konferensi gagal atau tidak berjalan secara optimal. Melalui penulisan ini, disarankan bahwa pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan di Kelurahan Sungai Beliung.

**Kata Kunci : Koordinasi, Kegiatan Pelatihan Keterampilan, lemahnya koordinasi**

## ABSTRACT

Problems of coordination in women's empowerment programs in the Village of Sungai Beliang is no implementation of vocational training activities in the empowerment of women, due to lack of women's empowerment program coordinated between the Agency for Community Empowerment of Women Children and Family Planning of Pontianak as coordinating parties, with the Sungai Beliang Village as coordinated parties for conducting skills training in women's empowerment program. Writing this article uses the theory of horizontal coordination among agencies (Hasibuan, 2006) to determine the coordinates by the authority, coordination through consensus, through the coordination of work guidelines, coordination through forums, conferences coordination through the implementation of vocational training activities in the Village of Sungai Beliang . The approach used is descriptive qualitative analysis. The results showed that the lack of coordination led to failure in skills training activities for horizontal coordination between agencies (agencies) better coordination with the authority, coordination through consensus, through the coordination of work guidelines, coordination through forums, coordinated through the conference fails or is not running optimally. Through this research, it is suggested that the implementation of vocational training activities in the Village of Sungai Beliang.

Keywords: Coordination, Training Activities Skills, lack of coordination

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan khususnya pada pendidikan untuk kaum perempuan yang masih tertinggal pendidikan formal sehingga tidak bisa membaca dan menulis, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar perempuan memperoleh pendidikan. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan Nomor 17/Men.PP/Dep.II/V/2005, Nomor 28A/2005, dan Nomor 1/PB/2005, dalam Pasal (2) yang menyatakan bahwa, tujuan peraturan bersama ini untuk memberantas Buta Aksara Perempuan dalam upaya percepatan penurunan angka buta aksara melalui kebijakan khusus Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Pendidikan Nasional. Selanjutnya Pasal (4) menyebutkan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan ini, dilakukan melalui program Aksi Nasional Keaksaraan Fungsional yang diintegrasikan melalui program pendidikan Non Formal melalui magang, Kelompok Belajar Keterampilan (KBK), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Kecakapan Hidup (*life skills*) dan sejenisnya dengan mempergunakan seperangkat modul/instrument pembelajaran di Provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa.

Masalah penelitian mengenai tidak berjalannya kegiatan pelatihan keterampilan dalam program pemberdayaan perempuan, dikarenakan kurang terkoordinasinya program pemberdayaan perempuan antara Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan

Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak sebagai pihak yang mengkoordinir dengan Kelurahan Sungai Beliung yang sebagai pihak yang terkoordinir untuk melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan dalam program pemberdayaan perempuan. Dengan demikian lemahnya koordinasi horizontal antar badan (instansi) baik koordinasi melalui kewenangan, koordinasi melalui konsensus, koordinasi melalui pedoman kerja, koordinasi melalui forum, koordinasi melalui konferensi sehingga gagal atau tidak berjalan optimal.

Jumlah penduduk di Kelurahan Sungai Beliung 58.602 jiwa terdiri dari laki-laki 30.006 jiwa dan perempuan 28.596 jiwa, Jumlah perempuan yang tercatat sebagai kepala keluarga berjumlah 1.984 orang, dan diketahui jumlah perempuan yang mengurus rumah tangga berjumlah 11.775 orang, sedangkan data perempuan yang tercatat belum atau tidak bekerja secara keseluruhan berjumlah 8.171 orang. Jumlah perempuan yang tidak mengenyam pendidikan terhitung mulai dari usia sekolah dasar berjumlah 2.981 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah tamat SD yang berjumlah 5.300 jiwa, SMP berjumlah 4.468 jiwa, dan SMA berjumlah 7.152 jiwa.

Fokus permasalahan : koordinasi horizontal dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat. Rumusan masalah : Mengapa koordinasi horizontal dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat tidak berjalan optimal?. Tujuan masalah : untuk mengetahui dan

menganalisis koordinasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dalam kegiatan pelatihan keterampilan di Kelurahan Sungai Beliang.

## TEORI KOORDINASI

Koordinasi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan efektivitas program dalam melaksanakan proses pekerjaan agar dapat mewujudkan tujuan dan hasil yang telah diharapkan. Menurut Hasibuan (2006:85), koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar para manajer mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut.

Berdasarkan permasalahan dan perkembangan teori kebijakan publik yang telah dipaparkan teori yang paling relevan untuk menganalisis koordinasi dalam program pemberdayaan perempuan di Kelurahan Sungai Beling Kecamatan Pontianak Barat adalah teori Hasibuan (2006). Inti dari pemikiran teori Hasibuan (2006) sebagai mana mengungkapkan:

Koordinasi horizontal (*Horizontal Coordinatiiori*) adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparap) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas *interdisciplinary dan interrelated*.

Untuk terselenggaranya koordinasi yang baik. Untuk melaksanakan koordinasi antar badan (instansi) diperlukannya

formulasi sebagai metode koordinas (Ismardi, 1991) yakni, koordinasi melalui kewenangan, koordinasi melalui konsensus, koordinasi melalui pedoman kerja, koordinasi melalui forum, dan koordinasi melalui konferensi.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan Koordinasi horizontal *inter-related* dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat diharapkan saling terhubung baik dengan diadakannya kerja sama, melalui : Kewewenangan, Konsensus, Pedoman Kerja, Forum, dan Konferensi sehingga Program pemberdayaan perempuan di Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat berjalan optimal.

## METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan informasi tentang koordinasi dalam program pemberdayaan perempuan di Kelurahan Sungai Kecamatan Pontianak Barat, maka dalam penelitian ini memilih untuk menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan jenis pendekatan dan analisis kualitatif. Selain itu, yang menjadi informan dipilih dan ditetapkan secara *purposive* dan teknik *incidental*.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik trigulasi untuk data primer dan sekunder, berfungsi sebagai *chek and cross check* data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, pengumpulan data primer mempergunakan teknik wawancara dan observasi. Wawancara ditunjukan kepada informasi kunci terdiri dari Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Kota Pontianak, Camat Pontianak Barat, Lurah Sungai Beliang, dan Ketua Ibu-ibu PKK Kelurahan Sungai Beliang.

Pengumpulan data sekunder bersumber dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak dan Kelurahan Sungai Beliang.

Dalam teknik analisis data, peneliti menggunakan model Miles and Huberman, yaitu *data reduction* (data reduksi), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verifikasi* (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Teknik analisis data dilakukan dalam proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Koordinasi melalui kewenangan

Pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan yang dikoordinasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak dan Kelurahan sungai beliang sebagai pihak yang terkoordinasi tidak pernah terlaksana karena minimnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan, seperti yang diungkapkan oleh Kasubid Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak yang mengungkapkan bahwa :

“Kegiatan pelatihan keterampilan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga dengan pembelajaran melalui kegiatan keterampilan. Pada bagian perencanaan lebih memfokuskan pada

kelurahan yang aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh ibu-ibu PKK untuk diikutsertakan dalam lomba pembangunan kelurahan meningkatkan perempuan yang kualitas. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kuota untuk mengikuti pelatihan tersebut minim maka dari itu peserta yang mengikuti sangat terbatas hanya untuk 40 orang perkelurahan bahkan perkecamatan.”

Apa yang disampaikan oleh Kasubid Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak sebagaimana kutipan diatas menunjukkan bahwa minimnya anggaran merupakan faktor penyebab lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan di Kelurahan Sungai Beliang.

Pihak yang terkoordinir Kelurahan Sungai Beliang harusnya mengikuti pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan. Seperti yang diungkapkan oleh Lurah Sungai Beliang, yang mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan dirasakan memang dibutuhkan guna meningkatkan perekonomian keluarga untuk memberikan wawasan dari kegiatan pelatihan keterampilan yang sangat diharapkan. Dalam kegiatan pelatihan keterampilan saya akan menyerahkan kepada ibu-ibu PKK untuk mengurusnya ibu-ibu PKK Kelurahan Sungai Beliang.”

Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan memang merupakan tugas dari ibu-ibu PKK Kelurahan Sungai Beliang dalam pelaksanaanya Kelurahan Sungai Beliang

yang dibenarkan oleh Ketua ibu PKK , yang mengatakan bahwa:

Kegiatan apapun yang berupa bertujuan untuk meningkatkan sumberdaya manusia perempuan di Kelurahan Sungai Beliang merupakan tugas kami, karena kami ibu-ibu PKK di Kelurahan Sungai Beliang akan membantu pelaksanaan Kegiatan Pelatihan keterampilan mulai dari tempat pelaksanaan maupun keberlangsungan kegiatan pelatihan keterampilan.

Apa yang telah disampaikan oleh Lurah Sungai Beliang sebagaimana yang menunjukkan bahwa kaum perempuan di Kelurahan Sungai beliang mengharapkan pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan dapat terlaksana di Kelurahan Sungai Beliang. Dengan jumlah perempuan yang tercatat belum atau tidak bekerja secara keseluruhan berjumlah 8.171 orang. Jumlah perempuan yang tidak mengenyam pendidikan terhitung mulai dari usia sekolah dasar berjumlah 2.981 jiwa.

Menurut Kasubag Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pontianak barat, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak sudah memberikan surat pemberitahuan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan untuk disetiap kelurahan di Kecamatan Pontianak Barat, wewenang pihak Kecamatan Pontianak Barat memberikan pemberitahuan kepada setiap kelurahan termasuk Kelurahan Sungai Beliang dalam kegiatan pelatihan keterampilan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak untuk diikuti oleh setiap kelurahan termasuk Kelurahan

Sungai Beliang. (Sumber: hasil wawancara dengan Kasubag Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pontianak Barat).

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai sumber menunjukkan bahwa koordinasi melalui kewenangan yang ada yakni lemahnya koordinasi dalam program pemberdayaan perempuan di Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat.

#### b. Koordinasi melalui konsensus

Lemahnya koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak sebagai pihak yang mengkoordinir dengan Kelurahan Sungai Beliang sebagai pihak yang terkoordinir dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan pelatihan keterampilan di Kelurahan Sungai Beliang.

Menurut Kasubag Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pontianak Barat, koordinasi melalui konsensus dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan yang merupakan kegiatan dari program Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak memang harus dilaksanakan supaya kegiatan pelatihan keterampilan dapat terlaksana di Kelurahan Sungai Beliang. Seperti yang dikatakan oleh ketua ibu PKK di Kelurahan Sungai Beliang, pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan mampu menunjang sumberdaya manusia perempuan di Kelurahan Sungai Beliang khususnya perempuan yang kurang mampu sehingga meningkatkan perekonomian keluarga. Namun pelaksanaan kegiatan pelatihan

keterampilan di Kelurahan Sungai Beliang tidak pernah terlaksana. Menurut Lurah Sungai Beliang yang mengatakan:

“Bentuk koordinasi melalui konsensus tidak pernah dilaksanakan antara Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak dengan Kelurahan Sungai Beliang karena kegiatan tersebut tidak pernah terlaksana di Kelurahan Sungai Beliang.”

Berdasarkan informasi yang telah diungkapkan menunjukkan bahwa koordinasi melalui konsensus dalam program pemberdayaan perempuan di Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat tidak pernah terlaksana dikarenakan lengahnya penanganan.

#### c. Koordinasi melalui pedoman kerja

Pedoman kerja yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak sudah ada berupa program yang telah tersusun dengan mengerahkan bidang pemberdayaan perempuan sebagai pihak yang melaksanakan sesuai tata kerja yang ada.

Dalam kegiatan pelatihan keterampilan dalam pelaksanaannya tim penggerak melibatkan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak dengan Ibu-ibu PKK di Kelurahan atau di Kecamatan yang akan dilaksanakan mulai dari tenaga pengajar keterampilan, penyediaan bahan bakunya dan penyediaan tempat pelaksanaannya yang sudah disepakati bersama. Pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan biasanya dilaksanakan sampai tiga hari. (sumber: hasil wawancara Kasubbid Pemberdayaan

Perempuan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak).

Menurut Lurah Sungai Beliang, koordinasi melalui pedoman kerja dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan di Kelurahan Sungai Beliang oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak dengan Kelurahan Sungai Beliang tidak pernah ada karena kegiatan yang disusun oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak tidak pernah terlaksana di Kelurahan Sungai Beliang.

Ketua ibu PKK di Kelurahan Sungai Beliang membenarkan ungkapan yang dikatakan lurah Sungai Beliang dengan mengungkapkan bahwa :

“Kegiatan pelatihan keterampilan tidak pernah terlaksana, jika terlaksana pastinya melibatkan kami ibu-ibu PKK Kelurahan Sungai Beliang karena kegiatan seperti itu pastinya melibatkan kami ibu-ibu PKK Kelurahan Sungai Beliang sebagai tim penggerak atau panitia pelaksana dari Kelurahan Sungai Beliang.”

Menurut Kasubbag Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pontianak Barat, bentuk pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak berupa kegiatan pelatihan keterampilan yang diharapkan mampu menunjang perekonomian sumber daya manusia (SDM) perempuan, yang dalam kegiatannya melibatkan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana

(BPMPAKB) Kota Pontianak dengan ibu-ibu PKK namun dalam pelaksanaan di kelurahan pihak Kecamatan Pontianak Barat tidak terlibat kecuali diadakan tingkat kecamatan.

Berdasarkan informasi yang telah diungkapkan menunjukkan bahwa koordinasi melalui pedoman kerja dalam program pemberdayaan perempuan di Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat sudah ada namun tidak pernah terlaksana.

#### d. Koordinasi melalui forum

Dalam koordinasi melalui forum sudah pernah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak, berupa rapat yang ditujukan kepada Kecamatan Pontianak Barat yang harus dihadiri oleh masing-masing perwakilan dari setiap Kelurahan yakni Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Sungai Jawi Luar, Sungai Beliung dan Kelurahan Pal lima.

Rapat pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan yang merupakan kegiatan dari program Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak. Pada saat itu kegiatan tersebut dihadiri oleh masing-masing perwakilan dari masing-masing kelurahan yang ada di Kecamatan Pontianak Barat termasuk Kelurahan Sungai Beliung. (*sumber: hasil wawancara dengan bidang Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pontianak Barat*).

Hasil dari koordinasi melalui forum yang diadakan pada tanggal 3 Mei 2014 di kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak membahas tentang pelaksanaan

kegiatan pelatihan keterampilan yang akan diadakan di setiap kelurahan merupakan pembelajaran berupa pelatihan keterampilan dan pembinaan usaha masyarakat yang akan diberikan, berupa kegiatan pelatihan keterampilan bagi masyarakat kurang mampu dan pembinaan usaha ekonomi masyarakat.

Lurah Sungai Beliung mengungkapkan bahwa :

“Sebelum menghadiri rapat pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan, pihak Kecamatan Pontianak Barat memberikan surat pemberitahuan untuk mengikuti pertemuan rapat yang akan dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak yang diwakili oleh ibu-ibu PKK di Kelurahan Sungai Beliung.”

Ketua ibu PKK Kelurahan Sungai Beliung membenarkan yang diungkapkan oleh Lurah Sungai Beliung, pertemuan rapat untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan sudah pernah kami hadiri yang dilaksanakan di kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak.

Namun pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan di Kelurahan Sungai Beliung tidak pernah terlaksana meski pun koordinasi melalui forum sudah pernah dilaksanakan karena dirasakan lengahnya penanganan dan minimnya anggaran menjadi kendala pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan di Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat yang tidak terlaksana secara optimal di Kelurahan Sungai Beliung.

Berdasarkan informasi yang telah diungkapkan menunjukkan bahwa koordinasi melalui forum dalam program pemberdayaan perempuan di Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat sudah ada namun lemahnya penanganan dan minimnya anggaran mengakibatkan pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan di Kelurahan Sungai Beliang tidak pernah terlaksana.

e. Koordinasi melalui konferensi

Dalam penelitian ini koordinasi melalui konferensi tidak digunakan oleh penulis, karena sesuai dengan fakta yang ada dilapangan koordinasi tidak pernah diadakan di Kelurahan Sungai Beliang dalam kegiatan pelatihan keterampilan yang diadakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Koordinasi melalui kewenangan pada koordinasi dalam program pemberdayaan perempuan di Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu sebaiknya perlunya memperkuat koordinasi melalui kewenangan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing baik yang mengkoordinir maupun yang terkoordinir.
- b. Koordinasi melalui konsensus dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan tidak pernah dilaksanakan dirasakan lambannya penanganan yang diberikan oleh Badan Badan Pemberdayaan

Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak dalam kegiatan pelatihan keterampilan yang tidak terlaksana di Kelurahan Sungai Beliang. Oleh karena itu sebaiknya perlunya kegiatan berupa sosialisasi baik antar badan maupun dalam badan.

- c. Koordinasi melalui pedoman kerja dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan sudah ada berupa program yang telah tersusun namun pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan di kelurahan sungai beliang tidak terlaksana karena minimnya anggaran yang ada. Oleh karena itu sebaiknya adanya penambahan anggaran berupa sponsor dari produk-produk yang terkait dengan aksi kewanitaan.

- d. Koordinasi melalui forum dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan sudah pernah dilaksanakan namun dirasakan tidak efektif karena pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pelatihan keterampilan di Kelurahan Sungai beliang tidak terlaksana karena langkahnya penanganan. Oleh karena itu, sebaiknya perlu saling memberikan pendapat saru sama lain baik antar badan maupun dalam badan.

Adapun saran mengenai permasalahan yang ada di Kelurahan Sungai Beliang dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan berupa kegiatan pelatihan keterampilan yang meliputi :

- a. Memperkuat koordinasi horizontal *inter-related* antar Badan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak dengan

- Kelurahan Sungai Beliang agar program pemberdayaan perempuan berupa kegiatan pelatihan keterampilan terlaksana di Kelurahan Sungai Beliang.
- b. Melaksanakan sosialisasi ke Kelurahan Sungai Beliang tentang program pemberdayaan perempuan berupa kegiatan pelatihan keterampilan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak.
  - c. Kasubbid Pemberdayaan Perempuan harus memberikan rekomendasi kepada Kasubbag Perencanaan untuk memperhatikan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan berupa kegiatan pelatihan keterampilan di Kelurahan Sungai Beliang.
  - d. Kecamatan Pontianak Barat harus lebih peka dengan Kelurahan Sungai Beliang karena perempuan di Kelurahan Sungai Beliang masih banyak perempuan yang membutuhkan kegiatan pelatihan keterampilan.

#### REFERENSI

- Achmad, S. 1994. *Peningkatan Peran Wanita Dalam Pembangunan Kantor Mentri UPWRI*, Jakarta
- Browne, C. V. 1995. "Empowerment in Social Work Practice with Older Woman". *Social Work* , 40, 358-364.
- Handoko, T. Hani, 2003, *Manajemen Edisi Kedua* , BPFE:Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2006, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*,Edisi Revisi, Bumi Aksara:Jakarta.
- Ismardi, Ismael. 1991. *Teknik Koordinasi*. Padang: Diklat Propinsi Sumatera Barat.
- Kartasasmita, ginandjar. 1996 *Pemberdayaan untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan.)*. Jakarta: CIDES
- Kriswaty, Tati, 1993, *Peluang Kerja Perempuan Miskin, Dalam Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta
- Moleong, J. Lexy. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Strategi Pengarus-utamaanya Di Indonesia* . Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Pranaka dan Moeldjarto, 1996. *Pemberdayaan (Empowerment), Dalam Pemberdayaan, konsep Kebijakan dan Implementasi*. CSIS. Jakarta.
- Sajogyo, Pudjiwati, 2010, *Pemberdayaan Perempuan Pedesaan*. PSP3, Bogor.
- Soewarno Handyaningrat, 2002. *Pengantar Studi Administrasi dan Management* ,GunungAgung:Jakarta.
- Soekarno, K. 1985. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Miswar.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. 1993. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*.Yogyakarta : Gava Media
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan* Nomor 17/Men.PP/Dep.II/V/2005, Nomor 28A 2005, dan Nomor 1/PB/2005
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan barat tentangKependudukan dan*

*Pembangunan Keluarga  
Sejahtera Provinsi Kalimantan  
Barat* nomor 3 tahun 2007

*Undang-undang RI  
tentang Sisdiknas* No. 20 tahun  
2003





**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ELAS DIAM  
NIM / Periode lulus : E01110097 / 2014-2015  
Fakultas/Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
E-mail address/HP : elasdiam@yahoo.co.id / 085252214433

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa ELAS DIAM (\*) pada Program Studi ILMU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul (\*\*):

KOORDINASI DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DI KELURAHAN SUNGAI BELUNG KECAMATAN PONTIANAK  
BARAT

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui  
Pengelola Jurnal .....20-1-2015  
  
Dr. Anifin, M.A.B  
NIP. 197105021997021002

Dibuat di : PONTIANAK  
Pada tanggal: 20-1-2015

( ELAS DIAM )  
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

\*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).